



**RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
	9
1.1	Latar Belakang
	9
1.2	Landasan Hukum
	11
1.3	Maksud dan Tujuan
	13
1.4	Sistematika Penulisan
	14
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
	15
	TAHUN 2023
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD
	15
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	19
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	24
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	29
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
	29
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
	31
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	31
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja
	31
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
	32
4.1	Program dan Kegiatan
	32
4.2	Rencana Kerja dan Pendanaan OPD
	39
BAB V	PENUTUP
	40

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dapat selesai disusun sesuai dengan yang diharapkan.

Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap Kota Pangkalpinang.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Program Prioritas dan Sasaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, dimana Prioritas dan sasaran daerah tersebut mengacu pada prioritas dan sasaran yang terkandung dalam :

1. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

Atas tersusunnya rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

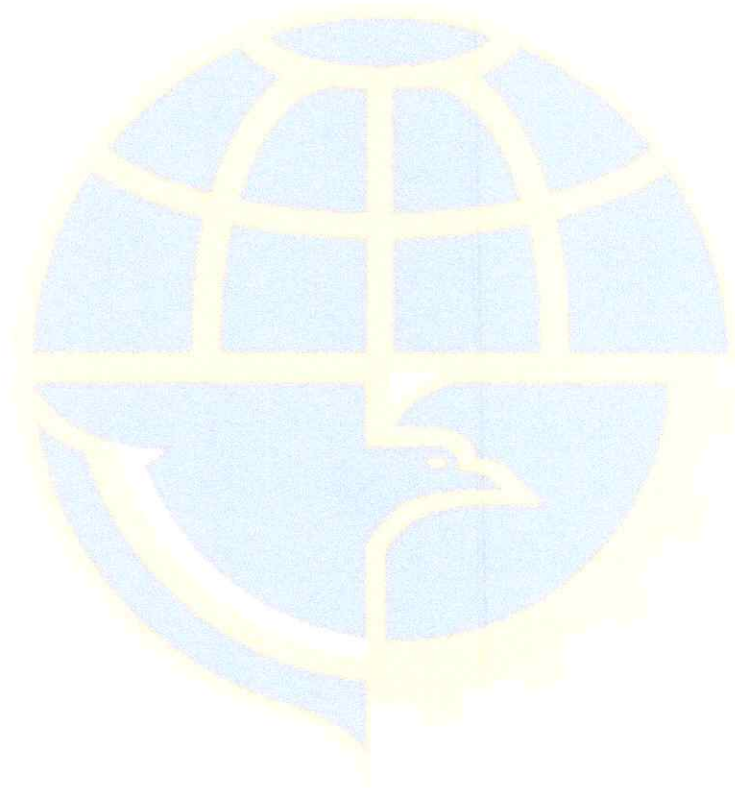
Pangkalpinang, Maret 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. UBAIDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641210 199203 1 006

**TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025**

Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT





PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Pahlawan 12 Kel. Gajah Mada Kec. Rangkui Telp/Fax.(0717) 431265
Kota Pangkalpinang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perlu disusun Rencana Kerja (RENJA);
 - b. bahwa RENJA sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangat Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tentang Rencana Kerja (Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025), dengan ketentuan umum, yaitu:

1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-OPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
7. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
8. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu

program atau kegiatan.

11. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
14. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kedua : Sistematika penyusunan **RENJA**, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan

Menjelaskan Rencana Kerja Berupa Program dan Kegiatan OPD berikut dengan Pendanaannya

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

Ketiga : Penjelasan lebih lanjut terlampir dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Pangkalpinang
Pada Tanggal : Maret 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kota Pangkalpinang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Pangkalpinang yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2024- 2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis (RPD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkalpinang sehingga dapat menghasilkan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan Peraturan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan organisasi perangkat daerah, Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan Program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

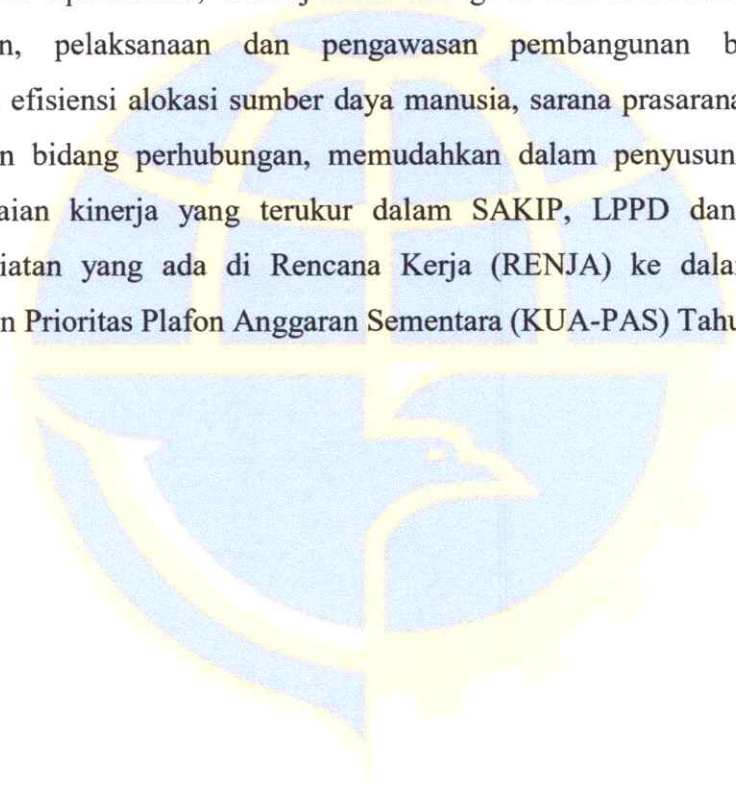
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menti Dalam Negri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2025, acuan dalam penyusunan SAKIP, LPPD dan LKPI, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang perhubungan, Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional, mewujudkan sinergitas dan keselaran antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang perhubungan, mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang perhubungan, memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam SAKIP, LPPD dan LKPI memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.



1.4. Sistematika Penulisan Renja

Perencanaan kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU berisi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN berisi :

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra OPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta menginventarisasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan.

Visi pembangunan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah: **“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)**. Sedangkan Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: **“UNGGUL”** Adapun misi RPJMD Perubahan yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu misi ke-3 yaitu: **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

Tujuan : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah,

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Indikator Sasaran : Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Misi merupakan turunan, penerjemahan atau perincian rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, upaya dengan pola yang dirumuskan menjadi misi-misi Dinas Perhubungan merupakan kepanjangan atau penjabaran dalam bentuk yang lebih operasional dari visi. Dari penetapan dan perumusan visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi misi sebagai berikut:

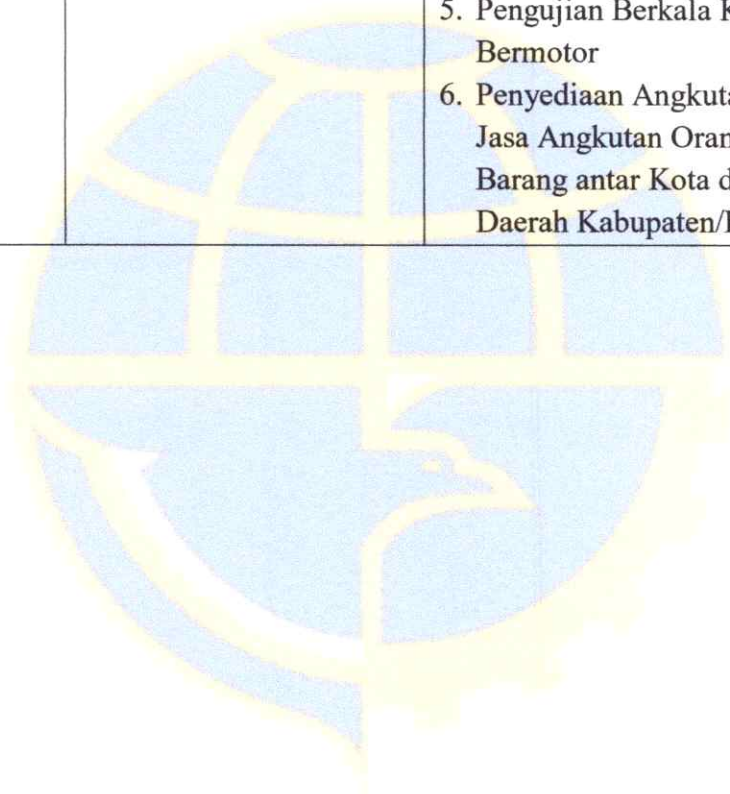
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur menuju tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan profesional.
2. Mengembangkan kualitas sarana angkutan perhubungan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan guna menunjang transportasi yang aman dan lancar.

Selama Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan-kegiatan OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi target kinerja. Kerja keras dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam berbagai kegiatan tersebut merupakan kunci sukses keberhasilan dan kelancaran program/kegiatan. Hasil Renja Dishub Kota Pangkalpinang Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan Tahun 2023 melaksanakan 1 urusan, 2 (Dua) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan, 29 (Dua Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN
1. Perhubungan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

		Pemerintahan Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Tabel 2.2
Pencapaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023
Urusan Perhubungan

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1	Retribusi Jasa Umum	1.350.000.000	1.362.764.000
	- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.050.000.000	1.071.023.000
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000	291.741.000
2	Retribusi Jasa Usaha	470.000.000	530.864.000
	- Retribusi Terminal Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	70.000.000	73.815.000
	- Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (TPI/PPI/RSUD/Pasir Padi)	400.000.000	457.049.000
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.091.200	11.246.500
	- Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.091.200	11.246.500
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.823.091.200	1.904.874.500

Tabel 2.3
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah Sebagai Berikut :

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kota Pangkalpinang Tahun 2023**

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6			7			8			9
1		021501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	9.758.628.079		100	9.357.574.569		100	95.890		SEKRETARIS
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			SEKRETARIS
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			SEKRETARIS
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			SEKRETARIS
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			SEKRETARIS
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:Persen)	100			100			100			SEKRETARIS
2		021501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	11.730.000		2	11.730.000		100	100		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
3		021501201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	3	2.000.000		3	2.000.000		100	100		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
4		021501201002	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	3	9.730.000		5	9.730.000		100	100		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		021501202	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	3.610.888.835		3	3.453.879.294		100	95.652		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		021501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	30	3.605.388.835		30	3.448.379.294		100	95.645		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
7		021501202005	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	3.500.000		1	3.500.000		100	100		SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8		021501202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2.000.000	2	2.000.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		021501204	Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	217.381.500	1	208.899.000	100	96.098	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN
10		021501204001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	217.381.500	1	208.899.000	100	96.098	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN
11		021501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	20.180.000	2	20.059.000	100	99.400	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
12		021501205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	181	20.180.000	181	20.059.000	100	99.400	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
13		021501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	5	279.257.400	6	278.856.860	100	99.857	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
14		021501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	27.500.000	1	27.430.600	100	99.748	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		021501206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	10.917.400	1	10.917.400	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		021501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	40.560.000	1	40.360.000	100	99.507	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		021501206005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	12.780.000	1	12.780.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		021501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	35	187.500.000	35	187.368.860	100	99.930	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		021501207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	114.275.000	2	110.603.050	100	96.787	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		021501207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	30.000.000	5	28.753.050	100	95.844	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		021501207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	84.275.000	1	81.850.000	100	97.123	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		021501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	3	4.946.933.648	3	4.731.820.266	100	95.652	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6		7		8		9
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
23		021501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	3	4.200.000.000	3	3.996.233.158	100	95,148	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		021501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	10	28.700.000	10	28.700.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	718.233.648	12	706.887.108	100	98,420	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	557.981.696	2	541.727.099	100	97,087	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya (Dengan Satuan:Unit)	15	557.981.696	15	541.727.099	100	97,087	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)											
28	-	021502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PREDIKAT KINERJA	70	8.437.732.712	70	8.375.714.211	100	99,265	BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN
29		021502201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN (Dengan Satuan:Persen)	2,170	1.287.176.632	2	1.285.449.982	100	99,866	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
30		021502201002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Perhubungan yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	50.800.000	1	49.573.350	100	97,585	SEKSI LALU LINTAS
31		021502201003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	4	1.236.376.632	4	1.235.876.632	100	99,960	SEKSI LALU LINTAS
32		021502202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	3	5.374.339.388	3	5.326.689.891	100	99,113	SEKSI PRASARANA
33		021502202001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	10	378.600.000	10	378.221.113	100	99,900	SEKSI KESELAMATAN
34		021502202002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	225	4.351.177.180	225	4.307.762.270	100	99,002	SEKSI PRASARANA

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp
						6		7	8	9
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:										
Faktor penghambat pencapaian kinerja:										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:										
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 29-02-2024 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG										



Drs. UBAIDI
NIP.196412101992031006

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

GAMBARAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Pangkalpinang Dinas Perhubungan merupakan unsur Pemerintah Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan diwilayah kota pada sektor Perhubungan yang implementasinya dijabarkan sebagai unit yang melaksanakan dan menata, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pengamanan, pengawasan dan evaluasi terhadap semua aspek yang berkenaan dengan Perhubungan.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam kaitannya dengan fungsi dan Tugas Dinas Perhubungan sebagai bagian dari penyelenggara tugas umum pemerintahan Kota Pangkalpinang yang bertumbuh pesat, kebijakan dan program strategis diarahkan kepada hal – hal yang factual didalam kehidupan masyarakat, kita angkat menjadi perencanaan strategis dan merupakan prioritas dalam jangka pendek (tahunan).

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Efektivitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;**
- b. Sarana dan Prasarana Jalan dan Penerangan Jalan Umum;**
- c. Penataan Parkir Guna Peningkatan PAD;**
- d. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;**
- e. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;**

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;

- b. Sasaran dan Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2025;
- c. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun tim/kelompok bisa ditingkatkan dan dikembangkan secara lebih profesional, proaktif dan kolektif/tim, sehingga diharapkan dimasa akan datang menjadi personil yang mumpuni dan kapabel bagi Dinas Perhubungan. Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan sumber daya manusia/aparatur antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (*sustainable*);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan sumber daya manusia di atas dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni menjadi modal utama dan potensial dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan sebagai sub ordinansi dari Organisasi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang.

Untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, pelaksanaan rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental serta latar belakang pendidikan yang memadai, yang ditunjang dengan mekanisme pendidikan dan pelatihan pegawai pada program Diklat Berjenjang maupun Diklat Fungsional Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang selalu proaktif, kreatif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Beberapa indikator kinerja utama dinas perhubungan kota Pangkalpinang sesuai dengan matrik di bawah ini :

MATRIK 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kinerja lalu lintas kota	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik			93%	95%	97%

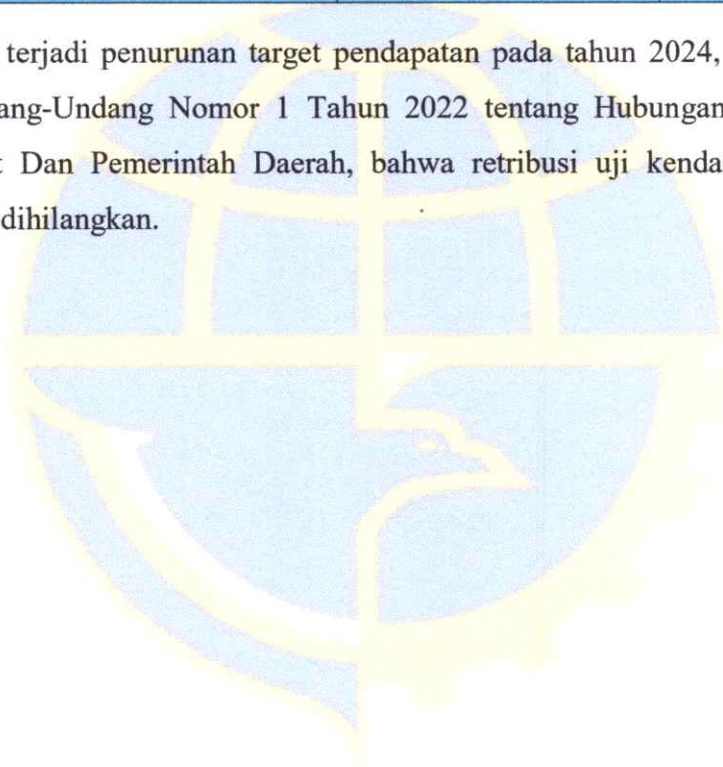
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan perhubungan	Meningkatnya rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,93	0,94	0,95		



MATRIK 2.2
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN DISHUB KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023 dan 2024

No.	Uraian	Anggaran (sebelum perubahan)	
		2023	2024
1.	Pendapatan	1.820.000.000	1.500.000.000
2.	Belanja tidak langsung	3.709.047.273	4.079.162.132
3.	Belanja langsung	9.683.587.920	11.568.078.626

Pada tabel diatas terjadi penurunan target pendapatan pada tahun 2024, hal ini disebabkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, bahwa retribusi uji kendaraan bermotor dan retribusi terminal dihilangkan.



2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pembangunan suatu wilayah, juga sangat terkait dengan berbagai isu yang berkembang baik pada skala lokal maupun global. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan khususnya transportasi berkelanjutan (sustainable transportation) telah menjadi isu global yang setiap negara dituntut menunjukkan tanggung jawabnya sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan lokal. Strategi pembangunan berkelanjutan muncul pada konferensi di Stockholm dimana 113 negara menekankan perlunya mulai membersihkan lingkungan secara global dikarenakan permasalahan polusi udara, polusi air, dan kontaminasi kimia tidak mengenal batas. Melalui Kyoto Protocol lebih dari 160 negara sepakat untuk mengurangi emisi gas buang rumah kaca. Masalah keberlanjutan pembangunan merupakan isu yang jelas berkaitan dengan masalah transportasi. Kebijakan yang diterapkan dalam mengelola sistem transportasi menjadi bagian sentral dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dampak lingkungan yang dirasakan akibat pengoperasian transportasi ini yang umumnya menjadi isu-isu yang berkepanjangan karena terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas manusia. Permasalahan mobilitas perkotaan seperti kemacetan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan degradasi lingkungan dari tahun ke tahun semakin kompleks. Selain itu dominasi kendaraan pribadi yang masih sangat besar memberikan konsekuensi terhadap kebutuhan parkir di perkotaan yang makin besar sementara space / lahan parkir yang tersedia sangat terbatas, di samping juga dampak terhadap kepadatan lalu lintas di jalan. Kondisi kapasitas jalan yang relatif sama dengan jumlah pertambahan kendaraan yang demikian pesat mengakibatkan pergerakan kendaraan semakin sempit apalagi ditambah dengan aktivitas perparkiran di Tepi Jalan Umum / badan jalan maka tidak bisa dihindari terjadinya penurunan kinerja jalan di daerah perkotaan. Mencermati berbagai isu strategis yang berkembang baik secara global maupun lokal serta permasalahan transportasi yang ada di Kota Pangkalpinang, maka dapat dirumuskan bahwa isu strategis transportasi Kota Pangkalpinang adalah :” Masih Rendahnya Peran Angkutan Umum di Kota Pangkalpinang dalam mendukung mobilitas perkotaan yang akan Berdampak pada Penurunan Kinerja Lalu Lintas, Kualitas Lingkungan dan Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan.”

Wilayah Kota Pangkalpinang yang tidak terlalu luas menuntut pengembangan transportasi yang efisien dan efektif. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan berbagai jajaran dan instansi terkait seperti dengan Kementerian Perhubungan agar ada keselarasan dalam hal Program Pembangunan, Selain itu juga diperlukan koordinasi dan sinergi antara Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar ada keselarasan dalam program pembangunan, dan terutama untuk program angkutan sebagai pengupayaan angkutan massal yang aman dan nyaman di Kota Pangkalpinang.

Salah satu faktor dan aktor utama terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah performa atau postur birokrasi yang mapan dan responsif, karena dalam posisi dan perannya yang begitu strategis maka dalam konteks sistem administrasi negara, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditopang oleh aparatur yang profesional akan melahirkan model penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan bersih serta berorientasi kepada kinerja dan hasil.

Dalam kaitan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (OPD) telah menggaris bawahi akan pentingnya tugas, pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sebagai titik sentral di dalam menjalankan fungsi-fungsi layanan publik yang amanah dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana kerja (Renja) OPD yang telah dibuat.

Secara garis besar, permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen tugas pokok dan fungsi ternyata belum sepenuhnya menjadi ruh dalam implementasi penyelenggaraan program kegiatan sehingga keterkaitan antara tupoksi dengan renja maupun renstra sangat rendah.
- b. Keterbatasan anggaran untuk memperbaiki Sarana dan Prasarana merupakan salah satu hal yang penting dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang Perhubungan
- c. Masih kurangnya jangkauan pelayanan angkutan umum massal di Kota Pangkalpinang sehingga belum mampu menekan peran penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda angkutan pilihan yang akhirnya akan berdampak pada penurunan kinerja lalu lintas, kualitas lingkungan dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.

- d. Lambatnya pertumbuhan jalan di kota Pangkalpinang yang tidak sebanding dengan peningkatan volume kendaraan di jalan, sehingga kelancaran lalu lintas menurun.
- e. Sebagai Wajah dari Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Kota Pangkalpinang masih sangat kurang dalam hal ketersediaan fasilitas tempat khusus parkir. Masih banyaknya parkir on street (Parkir Tepi Jalan Umum) berdampak pada kemacetan yang terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang.
- f. Masih ada masyarakat yang belum memahami dan kurang peduli terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga keselamatan dan ketertiban lalu lintas belum bisa terwujud, hal itu terlihat dari adanya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.



1. Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

No	Peluang	No	Tantangan
1	Letak Kota Pangkalpinang Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Pertumbuhan jumlah kendaraan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan prasarana jalan
2	Mengoptimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah yang berorientasi pada peluang investasi seperti Pengembangan transportasi Angkutan Massal	2	Kurangnya Minat Masyarakat Menggunakan Angkutan Umum dikarenakan Perkembangan Moda Transpotasi Umum berbasis Online
3	Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang	3	Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan
4	Mengoptimalkan Peranan Media Massa Cetak dan Elektronik Guna Menyebarkan Informasi Terkait Permasalahan Keselamatan Berkendara	4	Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efisien
		5	Usia kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan rata-rata diatas 10 tahun, mengakibatkan pelayanan angkutan umum tidak optimal dan menyebabkan kecelakaan
		6	Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat keselamatan lalu lintas jalan
		7	Masih terbatasnya pengembangan Kualitas SDM dibidang Perhubungan

3. Formulasi Isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

Prioritas tahun yang direncanakan :

- a. Kebijakan yang komperhensif untuk setiap pengambilan keputusan.
 - Melaksanakan pengembangan pengelolaan transportasi jalan yang handal.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana bidang perhubungan yang telah tersedia.
 - Memberdayakan pegawai sesuai dengan jabatan, kemampuan dan profesionalitasnya.
 - Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan instansi-instansi yang terkait dengan ketugasan di bidang perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Kepolisian dan Instans-instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
 - Meningkatkan kinerja peraturan dan kelembagaan melalui penataan sistem transportasi jalan, menyusun, merevisi dan menyempurnakan peraturan-peraturan bidang perhubungan berupa Peraturan daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputusan Walikota.
- b. Perlunya Konsistensi peraturan perundang mulai dari pusat sampai dengan peraturan-peraturan daerah.

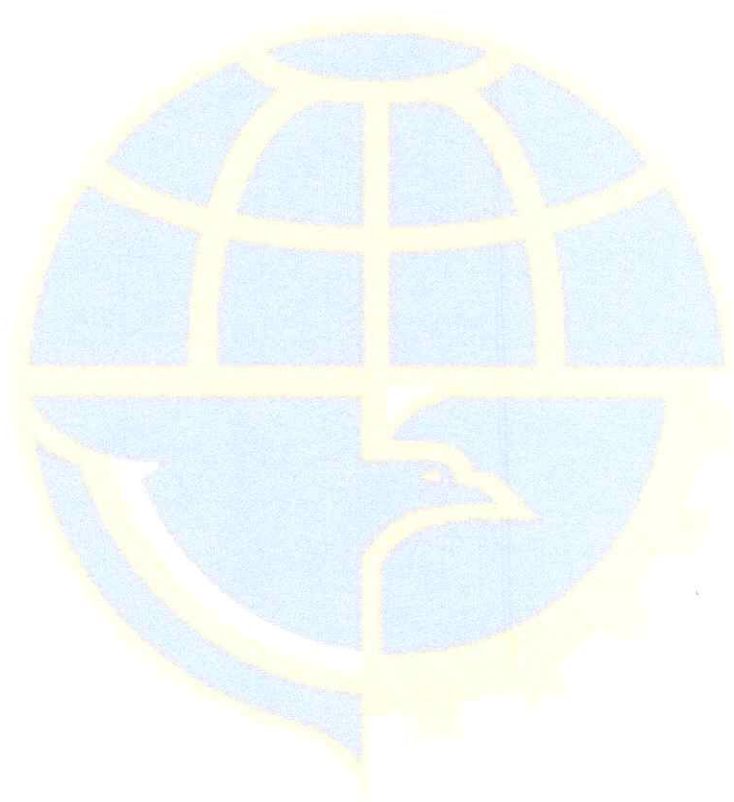
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Proses review ini dilakukan dengan alasan agar program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tercover dalam RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang akuntabel.
3. Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan dalam hal transportasi beserta sarana dan prasarana penunjang transportasi.
2. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disajikan dengan Tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5 Hasil Musrenbang Kecamatan



TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AKHIR	VOLUME	SATUAN
26-01-2024	Rudi Kurniawan,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Tingkat Kriminal Sangat Tinggi dan Sering Terjadi Tabrakan	Jalan Yos Sudarso Gang Cempaka V RT 001/RW 001 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kemalangan	Jalan Asam RT 002/RW 001, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Ada Lampu Jalan Sehingga di Daerah Tersebut Gelap	Jalan Sempayo III RT 005/RW 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
29-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Bangkalan RT 009/RW 003, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Dalam Keadaan Gelap Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Lada RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Gelap Tidak Berlampu Sehingga Mengganggu Aktivitas Warga	Jalan Salak III RT/RW 002/001 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Gelap Tidak Berlampu	Jalan Duku II RT/RW 002/001 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
29-01-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Ada Rumah yang Menutupi Persimpangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Cempedak I RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada lampu jalan, Sehingga pada malam hari jalan tersebut gelap. Membahayakan bagi pejalan kaki, kendaraan roda dua & roda empat yang melewatinya.	Jalan Trem Dalam RT 007 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan tersebut sehingga membutuhkan lampu jalan .	Jalan Trem Kolong Nangka 1 RT 006 RW 002 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan jalan, di perbatasan RT 008 dan RT 006 oleh karnanya meminta kepada pihak terkait untuk dapat memasang lampu jalan di area yang di tuju.	Jalan Air Nangka 1 RT 008 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik
29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan di jalan tersebut, Oleh karna itu di butuhkan pemasangan lampu jalan	Jalan Lada RT 007 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkul (antara kantor lurah ke rumah pak maddin), Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
29-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan ,Dibutuhkan pemasangan lampu jalan.	Jalan Abdul Somad RT 002 RW 001 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
30-01-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	Permintaan penerangan lampu jalan	Gang. Labu IV, RT. 003. RW. 003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
30-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Kampung Samak RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	titik
30-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Sering Terjadi Kecelakaan di Pertigaan dan Tikungan	Jalan Air Nangka I RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
30-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan tersebut sehingga dibutuhkan pemasangan lampu jalan.	Jalan Cempedak 1 RT 009 RW 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
31-01-2024	Depeti M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan lampu jalan dan perbaikan lampu yang rusak	Jl. Gaja Mada I, RT/RW 07/02 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
31-01-2024	Depeti M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Belum ada lampu penerangan jalan sehingga dimalam hari terlihat gelap.	Jalan Parit Lalang, Gang Bandes, RT.06 RW 02 Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
31-01-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Zambrud Dua , RT 013 / RW 003, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
31-01-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Abdullah Bursyah Nomor 56, RT 005 / RW 002 , Kelurahan Bukit Besar , Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Rawan Terjadi Kriminalitas	Jalan Cendawan RT 003/RW 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Lion Boen RT 006/RW 002, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
31-01-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Hormen Maddati Gang Buah Batu RT 002/RW 001, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik

31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Karna kurangnya penerangan di daerah yang di tuju ,membuat suasana kurang baik,dan berpotensi menjadi lokasi hal-hal yang berkaitan dengan kriminal,seperti pencurian dan transaksi narkoba	Jalan Cendawan ,Gang Panti RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Karena belum adanya kaca cembung di daerah yang di tuju. Dengan lokasi tikungan yang tajam sehingga sulit para pengemudi melihat ada tidaknya kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan Untuk menghindari kecelakaan berkendara .	Jalan Cendawan RT 003 RW 001 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan yang dituju	Jalan Solihin sampai Gang Pisang RT 006 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan pada jalan yang dituju, oleh karena itu di butuhkan pemasangan lampu jalan	Jalan Asam RT 002 RW 001 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan pada lokasi yang dituju	Jalan puri nirwana Gang Rukam 1 RT 004 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
31-01-2024	H. Ermawi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Karena Kurangnya Penerangan Pada lokasi yang di tuju	Jalan Sriwijaya RT 005 RW 002 Kelurahan Asam Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	6	Titik
31-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	banyak masyarakat mengeluh karena sering terjadi kecelakaan dan terjadi tindakan kriminal dikarenakan gelapnya daerah tersebut	Jalan Mustika II RT. 003 RW. 002 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
31-01-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Bedade Gang Pelita RT.006 RW. 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	9	titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Kopi RT 006/RW 003, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	Titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 001, RT 002, RT 003, RT 004 / RW 001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Lada RT 005 - RT 007/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
01-02-2024	Rudi Hentoni, S.T.	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan dikarenakan kurangnya penerangan jalan yang ada di daerah tersebut	Jalan Tempoa, RT 003 / RW 001, Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Trem RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Air Nangka I RT 006/RW 002, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
01-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Sungai Rangkui RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
01-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan pada malam hari sehingga jalan menjadi gelap di sepanjang jalan Lada	Jalan Lada RT 007/RW 002 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui (samping SMA Negeri 3 Pangkalpinang), Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
02-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan terlalu gelap karena tidak ada penerangan, sehingga sering terjadi kecelakaan.	Jalan Kiri RT 007/RW 002 persimpangan ada gorong-gorong sampai ke Universitas Muhammadiyah RT/RW 09/03, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
02-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Kondisi dan Sepanjang jalan dimalam hari gelap, maka butuh penerangan lampu jalan di belakang SMA N 3	Jl. cempedak I RT 07 RW 03, Belakang SMA N 3 Pangkalpinang, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
02-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Membutuhkan penerangan jalan karena dimalam hari jalan gelap	Jalan Semangka II RT 007/RW 003 Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
02-02-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan, Kondisi gelap, rawan transaksi Narkoba membutuhkan 3 Unit lampu	Jalan Gegading (Dekat Kantor Lurah Melintang) RT.009/RW.003, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
02-02-2024	Rudi Hentoni, S.T.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya lampu penerangan jalan	Jalan Kampung Melayu Gang. Sukun, RT 008 / RW 003, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
02-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengajuan Pemasangan Lampu Jalan, Untuk Menghindari Kecelakaan dan Hal-Hal yang Dapat Merugikan Masyarakat	Jalan Kenali Asam RT 009/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	9	Titik
02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan Jalan Toko Andika yang Rawan Kecelakaan	Jalan Veteran (Simpang Toko Andika) RT. 003/RW. 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik

02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan Jalan Yang Rawan Kecelakaan	Jalan Cendawan menuju Kantor Lurah, RT. 003/RW.001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
02-02-2024	Kalok	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Persimpangan jalan Buncis yang rawan kecelakaan	Jalan Buncis, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
02-02-2024	Kalok	Pemasangan Lampu Jalan	butuh penerangan lampu di jalan sriwijaya, sebagai akses masyarakat dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Sriwijaya RT. 005/RW. 002, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
02-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan di simpang Masjid Baiturrahman karena dalam dua bulan terakhir sudah ada dua kali kecelakaan	Jalan Kenali Asam RT 009/RW 003 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
02-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Usada RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
02-02-2024	Meltarin, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Memerlukan perbaikan lampu jalan yang sudah putus	Jalan Soekarno Hatta RT 006/RW 002 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
03-02-2024	Syahrudhoh	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan Lampu Jalan di Simpang Perumahan Panorama Zamrud	Jalan Masjid Al Husna, RT 006/RW 002, Perumahan Panorama Zamrud, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
03-02-2024	Djubaidah	Pemasangan Lampu Jalan	Dari jalan SMA N 04 Pangkalpinang kesimpang Lontong Pancur menuju Lontong Pancur dan Terminal Selindung, masih gelap dan sering terjadi kecelakaan	Jalan R. Hundani Gabek 2 (simpang Lontong Pancur), Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
04-02-2024	Panji Akbar, S.I.P	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan gelap karena kurangnya penerangan jalan	Jalan Per Jambudora RT 007/RW 002 Gang Dapid Wijaya, Perum Guru SD 39 Gabek Permai, Kelurahan Gabek I, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
04-02-2024	Panji Akbar, S.I.P	Pemasangan Lampu Jalan	Ada beberapa titik penerangan jalan yang belum terealisasi, karena sudah lama diajukan, mengingat rawannya kecelakaan.	Dijalan Baong RT 006/RW 002, di simpang 4 Pancur, Jalan Bedukang sampai terminal Selindung, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
04-02-2024	Syahrudhoh	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan lampu jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan Hidayatussalikin Dalam, Depan Rumah Bidan Nuri, Depan TPA Hidayatussalikin, Depan Rumah Ana, dan Depan Rumah Ustad Jamal, RT 004/RW 002, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
04-02-2024	Syahrudhoh	Pemasangan Lampu Jalan	Untuk Memberikan Penerangan Bagi Pengguna Jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan Nilam, RT 007/RW 003, Kelurahan Bacang, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
04-02-2024	Syahrudhoh	Pemasangan Lampu Jalan	Untuk Memberikan penerangan Bagi Pengguna Jalan Sehingga Mereka Merasa Aman Dalam Melakukan Aktivitas Perjalanan di Malam Hari	Jalan SMP Negeri 10, RT 005/RW 002, Kelurahan Tembran, Kecamatan Bukit Intan., Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
05-02-2024	Dr. Zulfriady, S.E.M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Jalan Gandaria II Belakang Masjid Jannatul Ma'wa, RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
05-02-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan pada malam hari	Jalan Pasir Putih, RT 009 / RW 003, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
05-02-2024	Endang Kristiani	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan lampu jalan untuk penerangan jalan pada malam hari	Jalan Tegal, RT 004 / RW 002, Kelurahan Semabung Baru, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Banyak nya motor dan mobil yang berlalu lalang, pemasangan cermin cembung agar mencegah terjadinya kecelakaan	Jalan Sakura , RT 001 RT 004 RT 005, RW 001, Kelurahan Gedung Nasional , Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	banyak aktivitas yang melalui jalan persimpangan dengan titik buta sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan	Jalan Trem , RT 01 , RW 01, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	titik
05-02-2024	Pribadi Muslim	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	banyak aktivitas yang melalui jalan persimpangan dengan titik buta sehingga menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan	Jalan Raden Eddy Martadinata, RT 01, RW 05, Kelurahan Gedung Nasional, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	titik
05-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan yang Sudah Rusak	Jalan Jakpar Yusuf RT 008/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
05-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan yang Sudah Rusak	Jalan Marica RT 008/RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik

06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Rambutan I RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan	Jalan Salak I RT 003/RW 001, Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan Lampu Jalan dan Perbaikan Lampu Jalan Agar Warga Semakin Aman Saat Berkendara di Malam Hari	Jalan Dewi Sartika RT/RW 004/002 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Adanya Penerangan Jalan	Jalan Gegading RT/RW 006/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalan Gelap Sehingga Mengganggu Aktivitas Warga di Malam Hari	Jalan Mesjid Al-Huda RT/RW 005/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
06-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak Ada Penerangan Lampu Jalan	Jalan Tomat RT/RW 004/002 Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
06-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Perbaikan Lampu Jalan, Sudah Banyak yang Rusak	Jalan Irian RT 003 - RT 004/RW 002, Kelurahan Gajah Mada, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	Titik
06-02-2024	Indrawati	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya penerangan jalan di Jalan R.E.Martadinata	Jalan R.E.Martadinata RT 001/RW 001 Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan dikarenakan Kondisi Jalan Gelap, Sehingga Rawan Kecelakaan	Jl. Gandaria (Flamenggo) 1 RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan dikarenakan Adanya Tikungan Tajam di Kawasan Tersebut Sehingga Rawan Kecelakaan Karena Tidak Saling Terlihat Pengendara yang Berlawanan Arah	Jl. Gandaria 1 (Flamenggo) RT.007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan dibutuhkan karena Kondisi Lampu yang Sudah Rusak	Jl. Kapten Sulaiman Arief RT. 002 RW. 001 Kelurahan Mesjid Jamik Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan Tikungan Rawan Kecelakaan di Karenakan Pengendara Tidak Saling Terlihat yang Berlawanan Arah	Jl. Abdurrahman Siddik Gang. Mepati RT.001 RW. 001 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan karena Kondisi Jalan Yang Gelap dan Rawan Tindak Kriminal	Jalan Cendrawasih RT. 009 RW. 003 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Jalan yang Ada di Kawasan Tersebut Sehingga Rawan Kecelakaan	Jl. Tempoa RT. 003 RW. 001 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
07-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Karena Kurangnya Penerangan di Sepanjang Jalan Dari SD Negeri 3 Sampai di Titik Simpang Raskin	Sepanjang Jalan Tampuk Pinang Pura RT. 009 RW. 003 Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	Titik
07-02-2024	Dr. Zulfriady, S.E.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Masjid Istiqlal RT. 007 RW. 003 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
07-02-2024	Dr. Zulfriady, S.E.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan karena kurangnya penerangan pada malam hari	Gang Wijaya Kusuma RT. 003 RW. 002 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	titik
07-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 005, RT 006, RT 007 / RW 002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik
07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	sering terjadi kecelakaan karena terbatasnya pandangan pengendara motor dan mobil	Jalan Pulau Gelasa RT. 009 RW. 002 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	titik
07-02-2024	H. Zeki Yamani, S.H.,M.H.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Diperlukan Kaca Cembung di Setiap Persimpangan	Jalan Jakfar Yusuf RT 008, RT 009 / RW 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	pemasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Sinar Bulan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	sering terjadi kecelakaan karena terbatasnya pandangan kendaraan bermotor	Jalan Sinar Bulan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
07-02-2024	Nursamsi, S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	minimnya lampu penerangan jalan	Jalan Tanjung Bunga 1 Perumahan Korpri RT. 007 RW. 003 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	8	titik
08-02-2024	Depeti M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak adanya penerangan jalan, sehingga membuat jalan menjadi gelap.	Jl. kenali asam RT/RW 09/03 didekat SD Negeri 16 Pangkalpinang, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	Titik

08-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Tidak ada penerangan lampu jalan dan ada beberapa lampu yang rusak	Jl. KH Abdul Rasyid dari mulai masjid Al-Karomah sampai SMA N 3 Pangkalpinang RT/RW 05/02 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
08-02-2024	Rano	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Lampu Penerangan Jalan di Daerah Tersebut	Jalan Mustika II RT 003/RW 001 (Jalan SMK PGRI), Kelurahan Sembung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
08-02-2024	Rudi Kurniawan,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Minimnya Lampu Penerangan Jalan Sehingga Tingkat Kriminal Sangat Tinggi dan Sering Terjadi Tabrakan	Jalan Yos Sudarso Gang Cempaka VI RT 001/RW 001 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	7	Titik
09-02-2024	Rosdiansyah Rasyid	Pemasangan Lampu Jalan	Pemasangan Lampu Jalan Minimnya Penerangan Jalan yang Hanya Mengandalkan Penerangan dari Rumah Rumah Penduduk Mengingat Kondisi Jalanan Sepi	Jl. Air Kampak RT. 010 RW. 003 Kelurahan Tua Tunu Indah Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
09-02-2024	Zalnuri	Pemasangan Lampu Jalan	pasangan 2 titik lampu jalan dan perbaikan 2 titik lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Jalan Yossudarso 1, Gang Cempaka 1, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	titik
09-02-2024	Zalnuri	Pemasangan Lampu Jalan	pasangan lampu jalan dikarenakan gelapnya jalan dan sering terjadi kecelakaan	Gang Cempaka 6, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Gabek 2, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	3	titik
21-02-2024	Depati M.A. Gandhi, S.H.,M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	perbaikan lampu yang sudah ada, namun lampu yang sudah tidak menyala lagi atau rusak	Jl. bathin iso RT/RW 05/02 Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	4	Titik
21-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E.,M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Penerangan Pada Titik Jalan	Samping SMP Negeri 3 Pangkalpinang, RT 002 RW 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
21-02-2024	Hibir	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Pada alamat yang dituju berada ditikungan sehingga sulit untuk melihat orang yang berkendara dari arah yang berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan cermin cembung	Persimpangan Jalan Veteran simpang Toko Andika, Jalan Cendawan RT 003/RW 001, menuju Kantor Lurah Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masing kekurangan beberapa titik dan banyak lampu yang mati	Jalan Bukit Sari Gang. Nyatoh, RT 005 RW 002, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	30	titik
22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masing kekurangan beberapa titik dan banyak yang rusak	Jalan Bukit Sari Gang. Nyatoh, RT006 RW 002, Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	15	titik
22-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	kurangnya jumlah lampu yang hidup	Jalan Cendrawasih, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	lampu jalan masih banyak kurang berapa titik dan banyak rusak	Jalan Kakak Tua, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurangnya Titik Lampu Pada Jalan	Jalan Bukit Manggis, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	penambahan lampu jalan yang baru	Jalan Vanila, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik
23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	penambahan titik lampu di jalan	Jalan Rejeki, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
23-02-2024	Dwi Pramono, S.E., M.M.	Pemasangan Lampu Jalan	titik tiang besar sudah ada tinggal jaringan dan tambahkan lampunya saja	Jalan Hasadah, RT 010 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	20	titik
23-02-2024	Abang Hertza, S.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Jalanan Gelap Tidak Ada Penerangan Sehingga Mengganggu Aktivitas Warga di Malam Hari	Jalan Lada RT/RW 009/003 Kelurahan Keramat, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
23-02-2024	Sadiri	Pemasangan Lampu Jalan	Karna banyak lampu jalan yang sudah padam/rusak, warga menghimbau untuk di lakukan pemeliharaan atau perbaikan lampu jalan di seluruh kelurahan Sriwijaya.	RT 007/RW 002 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Girimaya , Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
25-02-2024	Meitarini,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan pada malam hari di ujung Pasar Induk tepat di simpang sebelah Masjid	Jalan Jagal RT 001/RW 001 Kelurahan Pasar Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
25-02-2024	Meitarini,S.E.	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan pada malam hari	RT 002/RW 001 Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik
25-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan	Jalan Veteran RT 003/RW 003 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	1	Titik
25-02-2024	Hibir	Pemasangan Lampu Jalan	Kurang nya penerangan jalan dimalam hari	Jalan Min 2 RT 003/RW 001 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkul, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Titik

25-02-2024	Hibir	Pemasangan Cermin Cembung di Persimpangan	Membutuhkan cermin cembung karena berada di persimpangan	Jalan Min 2 RT 003/RW 001 Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangku, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	2	Unit
26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Penambahan Titik Lampu Baru	Gang Belinjo, RT 002 RW 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	Titik
26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengganti Bola Lampu Rusak atau Padam	Jalan Sumedang, Gang Pipit Dalam II, Dekat Masjid Baitul Hikmah (Depan Rumah Bapak Supranto), RT 006, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	10	titik
26-02-2024	Muhammad Rusdi, S.E., M.H.	Pemasangan Lampu Jalan	Pengganti Bola Lampu Rusak Atau Padam	Jalan Sumedang, (Depan Rumah Bapak Kemas Rozal), RT 006, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang	DINAS PERHUBUNGAN	5	titik

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KELURAHAN	OPD TUJUAN AKHIR	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KECAMATAN
11	1423606	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	(Pemasangan Lampu) Lingkungan Gelap dan untuk mengantisipasi keselamatan serta mencegah tindakan kriminal	Jln. Bandeng RT.03/01, Kota Pangkal Pinang	Rejo Sari	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	-
14	1423677	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Jalan untuk mengurangi daerah rawan dan gelap dalam mengantisipasi kerawanan tindakan kriminal	Jln. Bandeng I RT. 02/01, Kota Pangkal Pinang	Rejo Sari	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	-
15	1423702	15-02-2024	Kelurahan Rejo Sari	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Pemasangan Lampu Jalan untuk mengurangi daerah rawan dan gelap dalam mengantisipasi kerawanan tindakan kriminal	Jln. Bandeng 2 RT. 02/01, Kota Pangkal Pinang	Rejo Sari	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	-
35	1429718	16-02-2024	Kelurahan Tua Tunu Indah	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Penerangan pengguna Jalan sebanyak 15 titik	Jalan Raskin RT08 RW03, Kota Pangkal Pinang	Tua Tunu	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
36	1430031	16-02-2024	Kelurahan Kacang Pedang	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Penerangan untuk pengguna Jalan Jumlah usulan 7 titik	Jalan Istiqal Raya RT 10 RW 03, Kota Pangkal Pinang	Kacang Pedang	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
147	1450025	19-02-2024	Kelurahan Ampui	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	diklasi Gelap Untuk Merpermudah Aktivitas Warga (4 Titik)	Jl.kapak 2 Kearah SMP 4 Rt. 4, Kota Pangkal Pinang	Ampui	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Mohon untuk dapat diproses lebih lanjut
171	1553674	04-03-2024	Kelurahan Batu Intan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tidak adanya Penerangan Jalan saat malam hari. Volume 2 Titik	Jl. Sasuki Rachmad Gang Intan II Rt 001 Rw.001, Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Ditindaklanjuti
175	1553713	04-03-2024	Kelurahan Batu Intan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Tidak adanya Penerangan Jalan saat malam hari. Volume 3 Titik	Gang Batu Rubi II dan Tikungan Sumur Umum RT 007 Rw 002, Kota Pangkal Pinang	Bukitintan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Ditindaklanjuti
215	1576340	07-03-2024	Kelurahan Pintu Air	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	DI SEPANJANG JALAN SUNGAI RANGKUI KURANGNYA PENERANGAN VOLUME = 8 TITIK	RT. 001 RT. 002 RT. 003, Kota Pangkal Pinang	Pintu Air	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Sangat direkomendasikan
221	1576499	07-03-2024	Kelurahan Temberan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	masih adanya akses jalan kalau malam hari sangat gelap tanpa penerangan jalan	jalan gang sapu sapu rt 03 rw 01 atau masuk perumahan damai lestari 6 sepanjng jalan tersebut 10 titik, Kota Pangkal Pinang	Temberan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjut
224	1576620	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan jumlah 3 TITIK	Jalan Melati 1 RT003 RW001, Kota Pangkal Pinang	Bukitmerapin	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
225	1576660	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan jumlah 1 titik	Jalan Rumbia RT003 RW001, Kota Pangkal Pinang	Bukitmerapin	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
226	1576679	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk Penerangan Jalan jumlah 11 Titik	Jalan Bukit Manggis RT007 RW 002, Kota Pangkal Pinang	Bukitmerapin	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
227	1576701	07-03-2024	Kelurahan Bukitmerapin	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Untuk penerangan jalan jumlah 4 titik lampu	Jalan Bukit Permai RT 07 RW 02, Kota Pangkal Pinang	Bukitmerapin	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Prioritas
232	1577733	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan, begai	Jl. Musholla Mardhotillah/Jl. TPU China RT. 001/RW. 001, Kota Pangkal Pinang	Jerambah Gantung	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
234	1577759	08-03-2024	Kelurahan Jerambah Gantung	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Kondisi gelap, rawan kecelakaan,	Jl. Len Listrik 30 RT. 003/RW. 001 dan RT. 006/RW. 002, Kota Pangkal Pinang	Jerambah Gantung	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
266	1580596	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	tidak adanya penerangan jalan jadi jalan tersebut gelap, bisa mengundang terjadinya kejahatan penjemretan	JALAN KAMPUNG SAMAK RT 003 RW 001 KELURAHAN SINAR BULAN KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKALPINANG, Kota Pangkal Pinang	Sinar Bulan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjut
272	1580665	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	jalan tersebut gelap	gang Parit Cai rt 004 rw 002 kelurahan sinar bulan kecamatan bukit intan kota pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang	Sinar Bulan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjut
274	1580690	08-03-2024	Kelurahan Sinar Bulan	Pemasangan Cermin Cembung	banyaknya bangunan di tepi jalan jadi susahny penderata melihat pandangan kedepan saat di tikungan karna tertutup oleh bangunan.	gang gelasa rt 009 rw 003 kelurahan sinar bulan kecamatan bukit intan kota pangkalpinang, Kota Pangkal Pinang	Sinar Bulan	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindak lanjut
309	1593512	12-03-2024	Kelurahan Air Itam	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	belum ada penerangan sehingga pada waktu malam kondisi jalan gelap dan rawan kecelakaan	Jl. alk Bunyik RT03/01 sebanyak 4 tiang hub 0836899775 (abdurahman), Kota Pangkal Pinang	Air Itam	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindaklanjuti
310	1593517	12-03-2024	Kelurahan Air Itam	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	belum ada penerangan di sekitarnya	Jl. Bandes RT07/03, di butuhkan 6 Tiang Hrb. 081273904425, Kota Pangkal Pinang	Air Itam	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindaklanjuti
322	1595065	13-03-2024	Kelurahan Air Salemba	Pemasangan APIL	rawan terjadi kecelakaan dan kendaraan masuk jurang	jalan pikas 1, Kota Pangkal Pinang	Air Salemba	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
336	1595430	13-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI KECELAKAAN DAN PENJAMBERTAN	RT 012/002, Kota Pangkal Pinang	Semabung Lama	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindaklanjuti
338	1595439	13-03-2024	Kelurahan Semabung Lama	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	SERING TERJADI KECELAKAAN	RT 007/002, Kota Pangkal Pinang	Semabung Lama	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	untuk ditindaklanjuti
343	1595573	13-03-2024	Kelurahan Gabek Satu	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Belum ada lampu penerangan jalan sehingga mengakibatkan rawan kecelakaan dan pencurian	Jl. Gabus RT.005 RW.002 (Dekat Masjid Al-Khidret), Kota Pangkal Pinang	Gabek Satu	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
346	1595638	13-03-2024	Kelurahan Gabek Satu	Pemasangan Cermin Cembung	Tikungan / belokan jalan terlalu tajam jadi bila ada kendaraan lewat tidak terlihat yang bisa menyebabkan kecelakaan	Jl. Sembilang RT.005 RW.002, Kota Pangkal Pinang	Gabek Satu	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti
363	1601166	14-03-2024	Kelurahan Selindung Baru	Pemasangan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Gelap, tidak ada penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan dan rawan kejahatan	RT/RW 001 dan RT/RW 002, Kota Pangkal Pinang	Selindung Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	usulan telah sesuai, mohon dapat ditindaklanjuti

374	1608886	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Pemasangan Lampu Penerangan jalan	Kuburan terlalu gelap sering di salahgunakan	Jalan hormen maddati RT/RW 001/001 , Kota Pangkal Pinang	Melintang	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Sangat direkomendasikan
382	1609341	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Pemasangan Lampu Penerangan jalan	jalan yg perlu penerangan di lalui masyarakat (4 titik lampu)	Jl Masjid Alhuda RT/RW 005/002, Kota Pangkal Pinang	Melintang	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Sangat direkomendasikan
389	1609523	18-03-2024	Kelurahan Melintang	Pemasangan Lampu Penerangan jalan	4 titik lampu penerangan jalan	Jl Tomat 4 RT/RW 006/002, Kota Pangkal Pinang	Melintang	DINAS PERHUBUNGAN	Usulan dicek kembali, akomodir usulan yang mendukung prioritas pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2025	Sangat direkomendasikan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu:

- a. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
- b. Fungsi dari Dinas Perhubungan adalah perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perhubungan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan.

2.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang

- a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu:
“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Penyelenggaraan Perhubungan”
- b. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang yaitu:
Meningkatnya Rasio konektivitas kabupaten/kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
- Berdasarkan Hasil Pemetaan Permendagri No 90 Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Mempunyai 1 Program Non Urusan dan 1 Program Urusan Wajib Bukan Pelayan Dasar Perhubungan Terdiri dari 12 Kegiatan dan 82 Sub Kegiatan sebagai upaya untuk pencapaian target yang ditetapkan.
 - Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c) Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- h) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- b) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
- c) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
- d) Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
- e) Pengolahan Data Retribusi Daerah
- f) Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- g) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- e) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- f) Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- g) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
- h) Pemindahan Tugas ASN
- i) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- k) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Penyediaan Bahan/Material
- h) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pengadaan Alat Besar
- d) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e) Pengadaan Mebel
- f) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- h) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- i) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- j) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- k) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
- e) Pemeliharaan Mebel
- f) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- h) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- j) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- k) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- l) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- a) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
- b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- b) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- c) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- b) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- c) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
- c) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
- b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
- c) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
- d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

13) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sedangkan untuk Pagu Indikatif sebelum KUA-PPAS yang ditetapkan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk Dinas Perhubungan Sebesar Rp. **14.876.256.199** dari APBD Kota Pangkalpinang.

- b. Jenis Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang mengacu pada sasaran dan prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan dengan Indikator Sasaran yaitu : **Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota**. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan yaitu Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Untuk Pendanaan tidak sesuai dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan karena :
- Adanya permintaan dan kebutuhan untuk peningkatan fasilitas publik di bidang perhubungan;
 - Adanya Kebutuhan untuk perawatan dan pengadaan lampu Jalan umum
 - Penambahan Tenaga Pengendalian dan Pengawasan Lalin
- d. Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan-pembahasan baik saat examiniasi anggaran dengan TAPD, Komisi dan melalui proses Evaluasi Gubernur, maka anggaran Dinas Perhubungan untuk Tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 16.161.150.951**

Tabel 4.1 Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.161.510.951,00								1.750.000.000,00
								16.161.510.951,00								1.750.000.000,00
								16.161.510.951,00								1.750.000.000,00
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase peningkatan standar keselamatan lalu jalan kendaraan bermotor Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	30 % 65 % 65 %			63 % 30,5 % 63 %	5.197.681.000,00						30 % 65 % 65 %	1.750.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen/Laporan Rencana Induk yang Tersusun	100 %			100 %	443.295.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan		100 %	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota					4 Dokumen	443.295.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersudinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70 %			65 %	2.245.017.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan		70 %	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun					125 Unit	483.285.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				350 Unit	1.654.918.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Perner ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terhabilitasi dan Tertelihara				50 Unit	106.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Perner ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengaliban Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 %			75 %	361.143.000,00			-	Pembangu nan Perner ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	80 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Perner ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara				2 Unit	260.684.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Perner ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	523.898.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota yang dilaksanakan	100 %			100 %	159.945.000,00			-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	159.945.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya laporan dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun	100 %			100 %	86.512.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin				4 Laporan	49.384.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalin														
			Jumlah penilai Andalin yang dilibatkan kompetensinya dan terakreditasi				2 Orang	20.453.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalan														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalan yang terawasi				4 Laporan	15.669.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kal Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penerima ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dari/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen/laporan pengendalian/pengawasan yang tersusun	100 %			100 %	150.059.000,00			-	Pembangu nan Penerima ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	150.059.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kal Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penerima ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00		DINAS PERHUBUNGAN
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai 95 Nilai			86 Nilai 75 Nilai	10.963.829.951,00						76 Nilai 87 Nilai	0,00	
	-	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0 %			0 %	188.289.000,00			-	Pembangu nan Penerima ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	87.809.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kal Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penerima ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00		DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			3 Dokumen	7.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Perencanaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	8.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Perencanaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %			100 %	291.358.000,00			-	Pembangunan Perencanaan Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11 Unit			11 Unit	197.899.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Perencanaan Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %			100 %	610.474.000,00			-	Pembangunan Perencanaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit			1 Unit	100.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Perencanaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

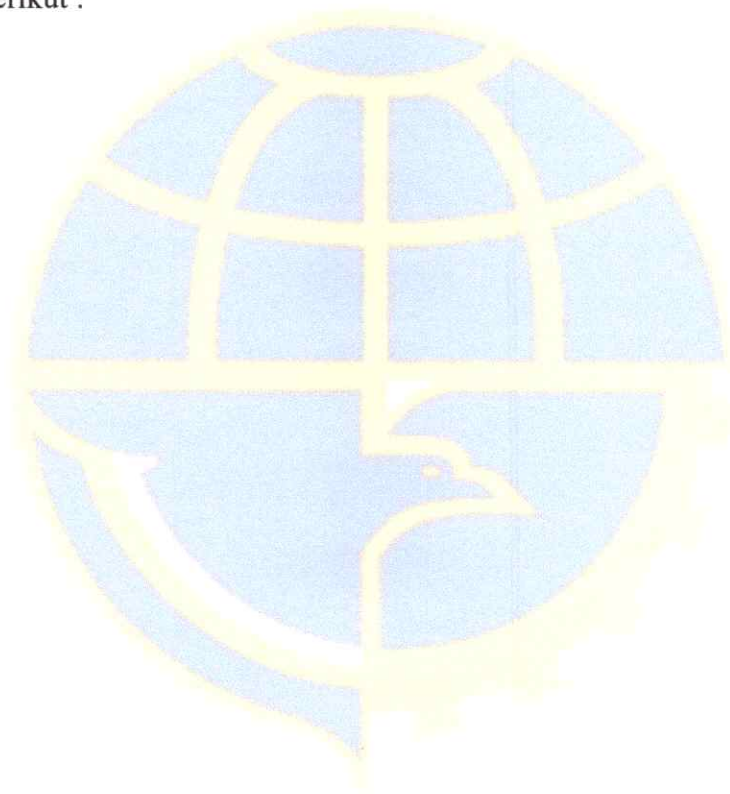
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA (PAD)	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15 Unit	509.925.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wileyah Berbasis Lingkungan	15	16	17
-			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				100 %	4.632.300,610.00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wileyah Berbasis Lingkungan	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												DINAS PERHUBUNGAN
-			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	4.007.935.610.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wileyah Berbasis Lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	602.718.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wileyah Berbasis Lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	21.647.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kali/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wileyah Berbasis Lingkungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET JAWAB PENGANTARA REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN REINSTR TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
								NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6	7	1 Paket	4.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Borobais Lingkuhan	13	14	15	16	17
-	-	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0 %			0 %	186.266.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Borobais Lingkuhan	-	0 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang		100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Borobais Lingkuhan	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
								16.161.510.951,00									1.750.000.000,00
J U M L A H																	

4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang pada Tahun 2025 mendatang akan menetapkan 2 program, 16 kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan penyebaran lokasi program dan kegiatan di pangkalpinang serta kegiatan dan subkegiatan tersebut sesuai dengan program nasional dan prioritas sasaran daerah, didanai oleh APBD Tahun 2025, Rencana Kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk 1 (satu) Tahun kedepan, dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERHUBUNGAN														
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.161.510.951,00							1.750.000.000,00	
								16.161.510.951,00							1.750.000.000,00	
								16.161.510.951,00							1.750.000.000,00	
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLA-J)	Persentase peningkatan standar keselamatan lalu jalan kendaraan bermotor Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan dalam kondisi baik	30 % 65 % 65 %			63 % 30,5 % 63 %	5.197.681.000,00						30 % 65 % 65 %	1.750.000.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen/Laporan Rencana Induk yang Tersusun	100 %			100 %	443.295.000,00			-	Pembangu nan Peme riahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			443.295.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme riahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	70 %			65 %	2.245.017.000,00			-	Pembangu nan Peme riahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	70 %	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	125 Unit			483.265.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme riahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlekangan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				350 Unit	1.654.918.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terhabilitasi dan Terpelihara				50 Unit	106.834.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 %			75 %	361.143.000,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	80 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C														
			Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 Dokumen	100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)														
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terhabilitasi dan terpelihara				2 Unit	260.684.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	523.898.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab/Kota yang dilaksanakan	100 %			100 %	159.945.000,00			-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	100 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	159.945.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tersutunya laporan dokumen Persetujuan Hasil Analitsis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang tersusun	100 %			100 %	86.512.000,00			-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	100 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				4 Laporan	49.384.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Wilayah Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang diinghalkan kompetensinya dan teracrtifikasi				2 Orang	20.458.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemeliharaan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andialin														
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andialin yang terawasi				4 Laporan	16.669.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pmeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen/laporan pengendalian/pengawasan yang tersusun	100 %			100 %	150.059.000,00			-	Pembangu nan Pmeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3 Laporan	150.059.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pmeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76 Nilai 95 Nilai			86 Nilai 75 Nilai	10.363.829.951,00					76 Nilai 87 Nilai	0,00		
	-	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0 %			0 %	188.268.000,00			-	Pembangu nan Pmeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				47 Paket	87.809.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pmeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3 Dokumen	7.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	8.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %			100 %	291.358.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	100 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				11 Unit	197.899.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %			100 %	610.474.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	100 %		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100.549.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	15 Unit				509.925.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penem nahan Peningklat n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	4.632.300.610,00			-	Pembangu nan Penem nahan Peningklat n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	100 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan				4.007.935.610,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penem nahan Peningklat n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan				602.718.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penem nahan Peningklat n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlangkasan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perlangkasan Kantor yang Disediakan	3 Laporan				21.647.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Penem nahan Peningklat n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4.655.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	0 %			0 %	186.258.000,00			-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-	0 %	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	100.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Peme ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
			J U M L A H					16.161.510.951,00							1.750.000.000,00	

BAB V PENUTUP

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan untuk Urusan Perhubungan, Dinas Perhubungan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui DAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran Perubahan.

B. Kaidah–kaidah pelaksanaan

pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

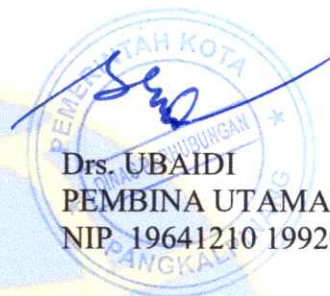
C. Rencana tindak lanjut

Rencana Kerja – OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja OPD Tahunan ini akan dilaksanakan di tahun 2025 dengan memperhatikan pedoman dan peraturan yang harus dipatuhi. Perencanaan Tahun 2025 ini diharapkan bisa mengcover semuanya dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai tindak lanjutnya dan tidak hanya menjadi sebuah dokumen saja.

Demikian rencana kerja OPD Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pangkalpinang, Maret 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. UBAIDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641210 199203 1 006

